

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kelaparan merupakan permasalahan global yang dihadapi banyak negara. Masalah kelaparan biasanya melanda negara-negara yang sedang mengalami konflik, krisis dan negara berkembang, meskipun negara maju juga tidak luput dari permasalahan ini. Adanya masalah kelaparan dan kekurangan gizi di Venezuela membuat beberapa rezim atau organisasi internasional berupaya untuk membantu menangani masalah tersebut. Lebih dari tiga juta orang atau sekitar 10% dari seluruh populasi Venezuela meninggalkan negara tersebut sejak tahun 2014. Sekitar 80% dari migran Venezuela ini mengungsi menuju ke negara-negara tetangga di Amerika Latin. Lebih dari satu juta orang melintasi perbatasan Kolombia, yang menjadikan Venezuela sebagai negara dengan jumlah pengungsian manusia terbesar dalam sejarah kawasan tersebut. (Pineda, 2018).

Venezuela dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia namun hal ini menjadi tidak ada artinya jika negara tidak memiliki keahlian untuk mengelola sumber minyak dengan baik. Venezuela terlalu bergantung pada industri minyak, sekitar 90% ekspor dan separuh pendapatan Venezuela berasal dari minyak. Pada tahun 2014 ketika harga minyak anjlok dari 115 dollar AS per barrel menjadi setengahnya, pertumbuhan ekonomi Venezuela anjlok sebesar 10%, hal ini menjadi permulaan yang membawa Venezuela ke jurang krisis berkepanjangan. (Setiawan, 2017)

Menurut laporan dari sejumlah universitas di Venezuela pada tahun 2017 menunjukkan krisis pangan yang terjadi di Venezuela menyebabkan perempuan dari seluruh jumlah penduduk mengalami kekurangan berat badan sebanyak 10 Kg. Akibat resesi yang terjadi Venezuela warga Venezuela kekurangan pangan dan

kebutuhan pokok sehari-hari, listrik padam secara rutin sampai 10 kali sehari. Tingginya harga pangan akibat inflasi menyebabkan warga mencari makanan hingga di tempat sampah. Salah satu daerah di bagian Zulia Venezuela mengalami kehancuran ekonomi yang parah, pasar di daerah itu menjual daging busuk untuk warga. Satu Kilogram daging busuk harganya sekitar 1% dari jumlah gaji minimum warga, satu kilogram daging segar dihargai 30% gaji minimum warga, daerah tersebut telah lama dikenal sebagai pusat industri minyak. (Krisis Venezuela: Warga makan daging busuk untuk bertahan, 2018)

Situasi sosial, ekonomi dan politik Venezuela sangat kompleks sehingga menimbulkan krisis kemanusiaan. Pemerintah Venezuela tidak mempertimbangkan kebijakan mereka dan terlalu bergantung pada industri minyak. Pemerintah memberikan subsidi pangan, akses ke perguruan tinggi, hingga layanan kesehatan bagi warganya. Sehingga ketika harga minyak turun pemerintah tidak mampu memberikan akses fasilitas yang diberikan. Niat baik pemberian subsidi ini telah menghancurkan negara Venezuela, ketergantungan yang berlebihan terhadap subsidi berakibat sangat fatal bagi perekonomian negara. Pada tahun 2015 menurut data organisasi Negara-negara pengeksport minyak (OPEC) Venezuela memiliki cadangan minyak mentah sebesar 300 miliar barrel. Angka ini melampaui Arab Saudi (266 miliar barrel), Iran (158 miliar barrel), dan Irak (142 miliar barrel). (Setiawan, 2017)

Venezuela mengalami resesi lebih dari enam tahun terakhir dengan tingkat inflasi yang menggila. Adanya hiperinflasi yang berkepanjangan ini menyebabkan 2,3 juta warga Negara Venezuela mengalami kelaparan, kemiskinan dan pengangguran yang pada akhirnya mengharuskan warga Negara Venezuela untuk meninggalkan negaranya dan bermigrasi ke berbagai negara tetangga. Hiperinflasi ini juga menyebabkan kondisi politik dan ekonomi Venezuela menjadi sangat tidak stabil. Investasi sulit masuk dan kondisi perdagangan internasional menjadi tidak seimbang. (Ilafi, 2018)

Dalam hasil survei nasional tahun 2019, sekitar 80% rumah tangga rawan pangan dan sebagian besar rumah tangga menerima bantuan pangan dari pemerintah hanya sesekali. Prevalensi malnutrisi akut pada anak balita meningkat di komunitas rentan di banyak negara bagian, melebihi ambang batas serius atau kritis di banyak negara bagian. Kematian akibat malnutrisi semakin sering terjadi, peningkatan jumlah anak yang masuk ke rumah sakit dikarenakan malnutrisi akut dan laporan dokter tentang kematian anak akibat malnutrisi akut merupakan indikasi dari krisis. (Shannon Doocy, 2019). Selama hampir satu dekade Venezuela telah mengalami krisis pangan. Ada 5 penyebab utama yang memberikan kontribusi terjadinya krisis pangan di Venezuela yaitu : (1) Negara yang terlalu bergantung pada minyak, (2) Infrastruktur politik yang buruk, (3) politik kekuasaan atas kesejahteraan, (4) Menimbun dan menjual kembali barang di pasar gelap dan (5) Sanksi AS terhadap Ekonomi Venezuela.

Pada awalnya presiden Venezuela Nicholas Maduro menolak bantuan dari organisasi internasional, Maduro telah berulang kali menolak bantuan kemanusiaan. Maduro mengklaim bahwa bantuan adalah upaya terselubung oleh AS dan pihak lain untuk mengacaukan pemerintahannya. Kelompok bantuan kemanusiaan telah lama mendorong pemerintah Maduro untuk mengizinkan WFP mendistribusikan bantuan makanan di Venezuela. Oposisi politik menuduh pemerintah Maduro, yang disebutkan kediktatoran, mengkondisikan bantuan pangan negara pada loyalitas politik, klaim tersebut dibantah Nicholas Maduro. Nicholas Maduro tidak akan membiarkan masuknya bantuan kemanusiaan palsu yang dapat mengintervensi negara Venezuela. (Venezuela: Maduro rejects humanitarian aid as nation starves, n.d.)

WFP sebelumnya telah bernegosiasi dengan pemerintah Maduro untuk mengizinkan badan tersebut memulai operasi di negara itu, tetapi pembicaraan ini berulang kali gagal, yang diklaim oleh oposisi karena keengganan Maduro untuk mengizinkan distribusi bantuan secara independen. Awalnya Nicholas Maduro

enggan untuk mengizinkan distribusi bantuan secara independen. (Cohen, 2021) Upaya ekstensif WFP untuk membangun operasi di Venezuela membuahkan hasil. Pada tahun 2019, Pemerintah Venezuela mengundang WFP untuk melakukan penilaian ketahanan pangan untuk memperkirakan kebutuhan dan kerentanan rumah tangga Venezuela. WFP memiliki kebebasan penuh untuk merancang dan mengimplementasikan penilaian dan memiliki akses di seluruh negeri untuk mengumpulkan data di tingkat rumah tangga tanpa hambatan atau halangan apapun. Hasil penilaian ketahanan pangan telah dibagikan kepada pemerintah Venezuela dan kini telah dipublikasikan. WFP menantikan kelanjutan dialognya dengan pemerintah Venezuela dan diskusi yang akan fokus pada cara ke depan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang rawan pangan. (Venezuela Food Security Assessment, 2020)

Dari survei ketahanan pangan (Community Food Assessment / CFA) yang dilakukan pada Juli dan September tahun 2019, ditemukan fakta bahwa sekitar sepertiga dari seluruh populasi Venezuela (lebih dari sembilan juta orang) tidak cukup makan dan membutuhkan bantuan. (One in three Venezuelans not getting enough to eat, UN study finds, 2020) Penilaian pangan masyarakat CFA merupakan langkah pertama dalam perencanaan ketahanan pangan masyarakat. Ketahanan pangan masyarakat adalah situasi dimana semua warga masyarakat memperoleh pangan yang aman, dapat diterima secara budaya dan mencukupi gizi melalui sistem pangan berkelanjutan yang juga memaksimalkan kemandirian masyarakat dan keadilan sosial. (Pothukuchi, 2004)

Selain WFP organisasi regional CELAC juga memberikan bantuan kepada Venezuela dan negara-negara Amerika Latin lainnya. Organisasi ini berfokus memberikan bantuannya dalam bentuk kebijakan untuk mengatasi penurunan daya beli untuk mengakses pangan. CELAC sendiri merupakan blok regional Amerika Latin dan Karibia, CELAC didirikan dengan tujuan untuk memperdalam integrasi Amerika Latin dan mengurangi pengaruh signifikan terhadap politik dan ekonomi di

Amerika Latin. Hugo Chavez yang merupakan presiden yang menjabat sebelum Nicholas Maduro mendukung pembentukan CELAC. Hugo Chavez dan para pemimpin lainnya seperti Rafael Correa dan Daniel Ortega, menyatakan harapan mereka bahwa Organisasi ini akan bekerja untuk memajukan integrasi Amerika Latin. Brazil menganggap CELAC sebagai panggung bagi negara-negara otoriter seperti Venezuela, Kuba dan Nikaragua. (Simoes, 2020)

Menurut data laporan lembaga The State of Food Security and Nutrition in the World 2020, biaya pola makan sehat di Negara Venezuela merupakan yang tertinggi di dunia, dengan nilai rata-rata USD 3,98 per hari per orang dengan keadaan depresiasi upah minimum dan inflasi tinggi di Venezuela, membatasi kemampuan orang untuk mengakses makanan berkualitas. (Venezuela Situation Report , 2020) Masalah kelaparan di Venezuela sangat memprihatinkan, kerawanan pangan yang terjadi berawal dari keputusan kebijakan yang buruk dan membawa bencana bagi rakyat Venezuela. Hal yang memperumit kondisi adalah politik, baik domestik maupun internasional. Untungnya banyak bantuan dari organisasi internasional yang menyadari perlunya membantu Venezuela tanpa agenda politik. (Yi, 2020)

WFP menganalisis pola konsumsi makanan, strategi mengatasi makanan dan mata pencaharian dan kerentanan ekonomi masyarakat melalui lebih dari 8.300 kuisioner. Hasilnya menunjukkan hampir 18 persen rumah tangga, atau sekitar satu dari lima orang, memiliki tingkat konsumsi makanan yang rendah. Dari jumlah tersebut, 12,3 persen tergolong borderline sedangkan 5,5 persen memiliki tingkat konsumsi makanan yang buruk. Kurangnya keragaman makanan menunjukkan asupan nutrisi yang tidak memadai. (One in three Venezuelans not getting enough to eat, UN study finds, 2020)

Konflik, terorisme, korupsi dan kerusakan lingkungan secara signifikan berkontribusi terhadap kerawanan pangan. Untuk mengatasi kerawanan pangan, diperlukan peningkatan produksi pangan, termasuk kebutuhan pokok. Hal ini harus

dikelola dengan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta mengubah perilaku konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya kerawanan pangan, kemajuan yang berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan sangat penting untuk dilakukan, demi meningkatkan akses terhadap pangan. Syarat fundamental untuk mencapai ketahanan yang berkelanjutan diperlukan lingkungan politik, sosial dan ekonomi yang damai dan stabil hal ini merupakan fondasi penting bagi negara agar dapat memberikan prioritas yang memadai pada ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. (Rome Declaration on World Food Summit, 1996)

Pada tahun 2020 situasi ketahanan pangan Venezuela kemungkinan akan memburuk, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan peningkatan kelaparan dan kemiskinan di Amerika Latin dan Karibia. Tindakan pencegahan yang diterapkan agar mencegah terjadinya penyebaran virus memiliki konsekuensi langsung pada berfungsinya sistem pangan. Seseorang mengalami rawan pangan ketika mereka tidak memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi ke makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menjalani hidup yang aktif dan sehat. Sebanyak 21,2 persen penduduk Venezuela, telah menghadapi kerawanan pangan, bahkan sebelum kasus pertama Covid-19 terjadi. Pada tahun 2019 diperkirakan 9,3 juta warga Venezuela menderita kerawanan pangan akut di negara itu, dan sebanyak 1,2 juta migran Venezuela yang berada di Kolombia dan Ekuador mengalami kemerosotan ketahanan pangan. (FAO, Food security under the Covid-19 pandemic, 2020)

Pada awal Mei 2020, sekitar 5,1 juta warga Venezuela (17 persen dari total populasi) meninggalkan negara itu karena tingginya tingkat kerawanan pangan. Pada 28 Mei 2020 ditengah pandemi Covid-19, sekitar 68.000 migran Venezuela kembali kenegara itu, hal ini dipicu oleh berkurangnya kesempatan kerja karena tindakan penahanan di negara tetangga. (GIEWS - Global Information and Early Warning System, 2020). Menurut hasil riset yang dilakukan CELAC efek Covid-19 pada

sistem pangan dan ketahanan pangan di Venezuela akan bervariasi, tergantung pada strategi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah Venezuela.

Efek tersebut akan menjadi lebih buruk ketika virus menyebar dari waktu ke waktu, dengan tidak adanya kebijakan pelengkap. Krisis kesehatan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap keberlangsungan perusahaan, tingkat pekerjaan, pendapatan dan ketahanan pangan. Efek ini akan bertambah besar seiring dengan ketidakaktifan ekonomi, efek pandemi dapat mempengaruhi kekuatan pembelian masyarakat, peran belanja makanan pada konsumsi total yang secara tidak langsung mencakup harga pangan dan sensitivitas permintaan dan perilaku konsumen. (FAO, Food security under the Covid-19 pandemic, 2020) Melalui *Community of Latin American and Caribbean States* (CELAC) Amerika Latin dan Karibia berusaha memberantas kelaparan, melalui organisasi ini Amerika Latin dan Karibia terus menunjukkan tingkat komitmen politik yang unik untuk memerangi kelaparan. Menurut FAO, wilayah ini adalah yang pertama di dunia yang mengusulkan tujuan memberantas kelaparan pada tahun 2025. (FAO, FAO, CELAC mengkoordinasikan upaya mereka untuk memberantas kelaparan, n.d.)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka munculah pertanyaan yang menjadi fokus pembicaraan dalam penelitian ini yaitu :  
“ Bagaimana Strategi WFP dan CELAC dalam menangani krisis ketahanan pangan dan keamanan pangan di Venezuela (tahun 2014-2020)”

### C. Kerangka Berfikir

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis akan menggunakan konsep berikut :

#### 1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional, lembaga yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga negara, mempunyai kegiatan di beberapa negara bagian, yang anggotanya disatukan oleh kesepakatan formal. Organisasi internasional melayani berbagai fungsi, termasuk mengumpulkan informasi dan memantau *trend*. Dengan menyediakan lembaga politik di mana negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, organisasi internasional dapat membantu mendorong perilaku kooperatif. (Mingst, n.d.)

Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy dalam bukunya :

“Administrasi dan Organisasi Internasional” menegaskan bahwa : “ Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas – batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan–tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, 2005)

Organisasi Internasional dapat di golongan sesuai dengan Kegiatan Administrasi dan Ruang Lingkup wilayahnya yaitu :

1. Organisasi Internasional Antara Pemerintah (*International Governmental Organization*) atau IGO. Anggotanya adalah pemerintah, instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi.
2. Organisasi Internasional Non Pemerintah (*International Non-Governmental Organization*) atau INGO dan NGO (*Non-Governmental Organization*) yang terdiri dari NGO Internasional dan domestik tergantung dari ruang lingkup kegiatannya.

Ruang Lingkup (Wilayah) Kegiatan Dan Keanggotaan yaitu :

1. Organisasi Internasional Global Wilayah kegiatan adalah global, dan keanggotaan terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia seperti; UN (*United Nation*), OIC (*the Organization of Islamic Conference*), WFP (*World Food Programme*) dan NAM (*the Non-Aligned Movement*).
2. Organisasi Internasional Regional Wilayah kegiatan adalah regional, dan keanggotannya hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja seperti; ASEAN (*Association of South-East Asian Nations*), CELAC (*Community of Latin American and Caribbean States*) GCC (*Gulf Cooperation Council*) dan EU (*European Union*). (Rudy, 2005)

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy adalah :

1. Tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO ( antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian – perjanjian Internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim – rejim Internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota. (Rudy, 2005)

Prof Stoessinger telah mendefinisikan konsep regionalisme sebagai pengelompokan tiga atau lebih negara bagian yang tujuannya adalah pembentukan entitas politik yang berbeda. Pengaturan regional adalah asosiasi sukarela dari negara-negara berdaulat yang telah mengembangkan organisasi yang cukup rumit.

(Stoessinger, 1986). Menurut Padelford pengaturan regional dalam lingkup politik internasional dapat digambarkan sebagai asosiasi negara-negara, berdasarkan lokasi di wilayah geografis tertentu, untuk melindungi atau mempromosikan peserta. Ketentuan asosiasi ini ditetapkan oleh perjanjian atau perjanjian lainnya. Atau memiliki kepentingan yang sama di wilayah itu untuk tujuan bersama, yang tidak boleh bersifat ofensif dalam kaitannya dengan wilayah tersebut. Faktor geografis adalah tidak hanya kondisi yang diperlukan dari regionalisme tetapi juga merupakan negara-negara tujuan atau pengorganisasian berdasarkan regional. Ide ini mempromosikan kerjasama dan kolaborasi di antara negara-negara anggota. Mereka terikat oleh geografis, budaya, ekonomi, kepentingan politik. Pengaturan regional mungkin bertujuan terbatas atau organisasi multiguna. (Padelford)

Pengaturan regional dalam lingkup politik internasional dapat digambarkan sebagai asosiasi negara-negara, berdasarkan lokasi di wilayah geografis tertentu, untuk melindungi atau mempromosikan peserta. Ketentuan asosiasi ini ditetapkan oleh perjanjian atau perjanjian lainnya. Berikut ini karakteristik utama dari Organisasi Regional oleh Normal J. Padelford dalam artikelnya "Perkembangan Terkini dalam Organisasi Regional":

1. Pengaturan regional bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan di antara para penandatangan.
2. Mereka berusaha untuk mendukung institusi gratis.
3. Mereka dirancang untuk membangun swadaya yang berkelanjutan.
4. Mereka mewajibkan para mitra untuk berkumpul untuk berkonsultasi di bawah ancaman.
5. Mereka menyadari bahwa agresi terhadap salah satu dari mereka adalah bahaya bagi mereka semua.
6. Mereka menyangkal niat untuk merusak atau melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Padelford)

Karakteristik organisasi regional ini pada dasarnya mengaitkan semua pengaturan yang diatur untuk mengamankan keamanan regional atau keamanan

negara anggota. Menurut *artitel*. 52 dari piagam PBB Bab VII yang memberikan dukungan kepada Organisasi Regional.: "Tidak ada dalam piagam ini yang menghalangi keberadaan pengaturan atau badan regional untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang sesuai untuk tindakan regional, asalkan pengaturan atau badan tersebut dan kegiatan mereka dilakukan. konsisten dengan Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Padelford)

## 2. Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan terjadi ketika semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan agar dapat hidup aktif dan sehat. (COMMITTEE ON WORLD FOOD SECURITY, 2012) Pendekatan ketahanan pangan :

### 1. Pendekatan ketersediaan pangan

Gagasan pendekatan ini merupakan tertua dan paling berpengaruh Meskipun gagasan inti dari pendekatan ini dapat ditelusuri kembali ke pemikir Venesia, Giovanni Botero (1588), Thomas Malthus (1789) yang mempopulerkannya, dan, pada kenyataannya, ini juga dikenal sebagai pendekatan Malthus. Pendekatannya difokuskan pada disequilibrium antara penduduk dan pangan: untuk menjaga keseimbangan tersebut, laju pertumbuhan ketersediaan pangan tidak boleh lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk. Konsekuensinya, dalam pandangan ini ketahanan pangan adalah perekonomian tertutup, hal ini terutama bergantung pada produksi dan persediaan pangan, sedangkan dalam perekonomian terbuka juga perdagangan pangan dapat memainkan peran yang relevan. Meskipun pada tahun 1996 World Food Summit mengadopsi, dengan konsensus besar, definisi ketahanan pangan yang jauh lebih luas dan maju, yang mencakup, selain ketersediaan, dimensi fundamental lain dari ketahanan

pangan seperti akses dan pemanfaatan pangan fokus sektoral yang sempit tentang pasokan pertanian, produktivitas dan teknologi masih mendominasi wacana dan praktik ketahanan pangan internasional. (Muro, 2012)

## 2. Pendekatan berbasis pendapatan

Pada awalnya fokus pada sektor pangan hanya sebatas pada produksi pertanian dan perdagangan pangan, namun hal ini dikritik oleh para ahli ekonomi karena terlalu terkonsentrasi pada satu sektor ekonomi tunggal. Ketahanan pangan tidak dapat dipandang sebagai masalah eksklusif sektor pertanian dan pangan. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk menggeser analisis ke arah ekonomi nasional secara keseluruhan. Hal ini memasukkan variabel analisis seperti Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi pasar, sistem ekonomi yang lebih kuat memungkinkan terjadinya impor barang-barang seperti makanan. Keseluruhan pendekatan ini dapat dianggap sebagai cara untuk memasukkan “sarana” nasional ke dalam kerangka kerja ketahanan pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan agregat. (Muro, 2012)

## 3. Pendekatan kebutuhan dasar

Pada paruh kedua tahun 1970-an, the International Labour Organization (ILO) mengusulkan pendekatan kebutuhan dasar dengan maksud memasukkan dimensi pembangunan non-ekonomi. Masalah kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pekerjaan, yang tercatat dalam periode-periode pertumbuhan ekonomi yang meningkat, adalah penyebab utama perubahan kebijakan. Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prasyarat untuk “kehidupan yang utuh”, yang terdiri dari elemen material dan nonmateri. Sifat praktis dari pendekatan ini, perlu untuk memberikan interpretasi pada kehidupan seperti membuat daftar kecil kebutuhan dasar yang dapat dijamin oleh pemerintah dan lembaga pembangunan. (Muro, 2012)

#### 4. Pendekatan hak

Pendekatan hak berkonsentrasi pada hak setiap orang atas paket komoditas termasuk makanan, dan memandang kelaparan sebagai akibat dari kegagalan untuk berhak atas paket apa pun dengan makanan yang cukup. Pada pendekatan hak yang terpenting adalah, semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi ke makanan pokok yang mereka butuhkan setiap saat. Pendekatan hak terbagi pada dua elemen:

- 1) Anugerah pribadi, yaitu sumber daya yang dimiliki secara hukum seperti rumah, ternak, tanah, dan barang tak berwujud
- 2) Seperangkat komoditas yang dapat diakses seseorang melalui perdagangan dan produksi, yaitu "pemetaan hak pertukaran".  
(Muro, 2012)

#### 5. Pendekatan mata pencaharian yang berkelanjutan

Kerangka *Sustainable livelihoods approach* (SL) bukan hanya pendekatan ketahanan pangan, tetapi pendekatan yang lebih umum untuk pembangunan dan kemiskinan. Meskipun konsep tersebut sudah pasti digunakan sebelumnya, “penekanan pada mata pencaharian” diberikan pada tahun 1980-an oleh Chambers (1983) dengan fokus pada pembangunan pedesaan dan kemiskinan. Kerangka SL lebih berhasil di antara pengembangan organisasi daripada di dunia akademis. Faktanya, berkat sifatnya yang fleksibel, holistik dan pragmatis, ini telah diadopsi oleh LSM (CARE, Oxfam) dan badan PBB (FAO, IFAD, WFP, UNDP).  
(Muro, 2012)

#### D. Hipotesa

Dalam penanganan krisis ketahanan pangan yang terjadi di Venezuela terdapat 2 lembaga organisasi internasional yang berusaha membantu menangani permasalahan tersebut, yaitu WFP dan CELAC. Kedua organisasi ini aktif

memberikan bantuan kepada Venezuela. Berdasarkan penjelasan di atas, peran dari kedua organisasi tersebut yaitu :

1. Melakukan Food Security Assessment (FSA) untuk memperkirakan kebutuhan dan kerentanan rumah tangga Venezuela. (WFP Venezuela Food Security Assessment Main Findings, 2020)
2. Merancang dan mengadopsi serangkaian tindakan untuk mempertahankan tingkat pasokan dari 12 item prioritas yang merupakan bagian dari bahan makanan, menjamin keberadaan rantai distribusi dan pemasaran di Venezuela. (FAO, Food security under the Covid-19 pandemic, 2020)

#### E. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Strategi WFP Dan CELAC Dalam Menangani Krisis Ketahanan Pangan Di Venezuela (Tahun 2014-2020)” dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui peran yang telah dilakukan World Food Programme dan CELAC dalam memberikan bantuan kepada warga Venezuela terkait masalah pangan dan nutrisi
2. Memberikan gambaran data dan fakta yang dijalankan WFP dan CELAC dalam menangani krisis pangan di Venezuela
3. Untuk mengetahui keadaan Venezuela akibat ketidakstabilan politik dan konflik yang terjadi.

#### F. Metodologi Penelitian

Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis memilih menggunakan metode penelitian

kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data seperti buku, majalah, jurnal, dokumen report, literature dan bahan-bahan lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber elektronik yang dapat diakses melalui instrumen internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data ini digunakan agar dapat membantu melengkapi dan sebagai bahan pembanding. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, analisis data tidak sekedar mengulangi penyebutan angka dari data, tetapi mencoba menjelaskan ada apa dibalik data tersebut dengan menggunakan analisis interpretasi. Analisis interpretasi berfokus pada pengkaitan antara data dan teori, interpretasi dilakukan dengan cara memanfaatkan data sebanyak mungkin. (Partini, n.d.)

#### G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian diperlukan untuk objek penelitian menjadi jelas, spesifik dan teratur, agar permasalahan topik yang dibicarakan tidak melebar. Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai upaya yang dilakukan WFP dan CELAC untuk membantu pemerintah Venezuela dalam menghadapi krisis pangan di dalam negerinya akan dibahas sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Alasan saya meneliti krisis ketahanan pangan pada tahun 2014-2020 dikarenakan pada tahun 2014 terjadi penurunan harga minyak secara signifikan hal ini telah mendorong terjadinya krisis ekonomi besar ditandai dengan 10% populasi Venezuela mulai meninggalkan Venezuela sejak tahun 2014. Sejak saat itu permasalahan mulai bermunculan banyak masyarakat yang menjadi pengangguran,

maraknya kekerasan, serta terjadi kekurangan makanan, air dan obat-obatan yang berujung pada terjadinya inflasi dan krisis ketahanan pangan.

#### H. Sistematika Penulisan

Agar menghasilkan karya tulis yang sistematis, maka penulis membagi sistematika penulisan menjadi tiga bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka berfikir, metode penelitian, hipotesa, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II pembahasan, menjelaskan tentang WFP dan CELAC Menjelaskan sejarah, tujuan, fungsi, wilayah kerja, sumber dana serta operasional WFP.

Bab III pembahasan, menjelaskan tentang sejarah, geografis, demografis Negara Venezuela, ekonomi, dan konflik di Venezuela yang mengakibatkan krisis ketahanan pangan terjadi.

Bab IV pembahasan, menjelaskan tentang peran WFP dan CELAC sebagai organisasi internasional guna mengurangi tingkat krisis pangan di Venezuela

Bab V kesimpulan, sebagai penutup berisi hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang berupa penutup dan kesimpulan.